

Kebijakan Ekonomi Kota Wasai, Raja Ampat 2013

Economic Policy Kota Waisai, Raja Ampat 2013

Herman Samsanoy

Universitas Nasional

hermansamsanoy@gmail.com

Abstrak

Kebijakan ekonomi Kota Wasai, Kabupaten Raja Ampat amatlah menarik untuk dikaji secara mendalam. Faktor masyarakat, budaya dan birokrasi di sana tentu memengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah. Oleh karena itu dengan metode kualitatif dan teori ekonomi politik ingin menganalisisnya dengan mendalam. Berdasarkan kajian tersebut terlihatlah jika investasi di Kota Waisai masih banyak mengalami kendala. Mulai dari SDM, kondisi social budaya masyarakatnya, hingga peran pemerintah sebagai media penghubung antara masyarakat dan pihak swasta masih kurang maksimal menjadi kendala yang harus diatasi bersama.

Kata kunci: Kota Wasai, Kebijakan Ekonomi, Investasi, Ekonomi Politik

Abstract

Economic policy of the City Waisai, Raja Ampat is very interesting to study in depth. Factors society, culture and bureaucracy there is certainly affect the government's economic policy. Therefore, the qualitative method and theory of political economy want menganalisisnya with depth. Based on these studies terlihatlah if the investment in the City Waisai still many obstacles. Ranging from human resources, social and cultural conditions of the community, to the government's role as a media liaison between the public and private sectors is still less than the maximum an obstacle that must be overcome together.

Keywords: Wasai city, Economic Policy, Investment, The Political Economy.

SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
Universitas Nasional

Pendahuluan

Dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggunakan pendekatan strategi di kawasan tersebut. Dengan demikian, Kota Waisai dijadikan sebagai pusat pemerintahan daerah (*centre of local government*) dan pusat perekonomian di Kabupaten Raja Ampat. Pendekatan ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan dampak positif dan sebagai stimulan bagi proses pembangunan di Kabupaten Raja Ampat --- khususnya daerah-daerah yang terisolasi.

Akan tetapi, dalam proses pembangunan Kota Waisai, Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat harus menghadapi tantangan sinergitas antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat. Ketiganya memiliki peran yang sama sebagai pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi sangat penting, serta tidak hanya berkaitan dengan kesamaan perspektif dan langkah pembangunan daerah. Namun, juga berkaitan dengan kelemahan pemerintah daerah dari segi finansial atau pembiayaan pembangunan.

Dalam perspektif ekonomi politik, pola kemitraan tersebut memiliki konsekuensi ekonomi politik. Dalam kajian ekonomi politik, terdapat asumsi dasar yang menyebutkan bahwa setiap orang tidak dapat mewujudkan pencapaian kepentingannya secara individual. Oleh karena itu, setiap individu harus bekerjasama dengan individu-individu lain yang memiliki korespondensi kepentingan, sehingga dapat bersama-sama berjuang secara kolektif. Pada konteks ini, setiap individu akan mentransformasi perjuangan kepentingan pribadi mereka ke dalam bentuk gerakan kelompok (Syarif Hidayat dalam Masyhuri dan Syarif Hidayat, 2001:11-36). Dengan pemahaman tersebut, kiranya sangat dapat dimengerti, bila perspektif ekonomi politik mengatakan bahwa "karakteristik" utama dari kehidupan politik tidak lain adalah kompetisi antarkelompok kepentingan, *interest group*, untuk mendapatkan akses terhadap perolehan keuntungan dan sumber daya yaitu dikontrol dan di alokasikan oleh Pemerintah (Syarif Hidayat dalam Masyhuri dan Syarif Hidayat, 2001:11-36).

Dengan asumsi tersebut, penulis bermaksud menggali lebih dalam kebijakan pembangunan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat yang telah dijalankan oleh pemerintah setempat, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada tiga sektor utama, demi terwujudnya kemandirian ekonomi daerah. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji apa saja faktor penghambat proses pembangunan ekonomi Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tahun 2013, serta bagaimana pola kemitraan antara pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi Kota Waisai tahun 2013?

Oleh karena itu, akan sangatlah menarik jika mengkaji pembahasan tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagaimana yang dikemukakan Hadari Nawawi (1999), serta memakai teori ekonomi politik.

Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah

Dalam kajian pembangunan ekonomi, terdapat dua terminologi yang berbeda, yakni pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang, serta dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi itu sendiri. Dengan demikian, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, pembangunan ekonomi juga menunjukkan peningkatan. Sementara itu, pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen Sadono Sukirno, 1996:33).

Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000:55). Sementara itu, Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) mengartikan kata pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap

masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Pembangunan ekonomi menurut Meier (dalam Raharjo Adisasmita, 2005:205) diartikan sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik, yaitu peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Adapun menurut Schumpeter (dalam Suryana, 2000:5), pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah, sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi menurut Simon Kuznets (dalam Suryana, 2000:6) adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Dalam proses pembangunan ekonomi terdapat 3 (tiga) komponen utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi terlihat dari meningkatnya

secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Dengan bahasa lain, Boediono (1999:8) menyebutkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang.

Boediono (1999:8) lebih lanjut menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan "output perkapita". Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Dalam mengukur pembangunan ekonomi, ada beberapa indikator yang selalu dipakai. Pertama, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), yaitu total produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun; kedua, produk domestik bruto per kapita, negara mengusahakan agar PDB per kapita naik secara simultan (terus-menerus) seiring dengan pertumbuhan penduduk; ketiga, indeks kualitas hidup, merupakan indeks non-ekonomi untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat (*physical quality of life index*). PQLI terdiri atas 3 indikator, yaitu kematian bayi, angka harapan hidup, tingkat 'melek huruf'; dan keempat, indeks pembangunan manusia, meliputi indeks gabungan dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, indeks standar hidup yang layak (Sadono Sukirno, 1996:23).

Dalam proses pembangunan ekonomi, setidaknya ada dua faktor utama yang mempengaruhinya, yakni faktor-faktor ekonomi,

meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan dan teknologi (faktor produksi); dan faktor non-ekonomi, seperti stabilitas ekonomi dan keamanan negara, pelayanan birokrasi yang memihak masyarakat, etos kerja dan kondisi sosial masyarakat (Sadono Sukirno, 1996:24).

Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektor-sektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor.

Konsep Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan daerah, dan nasional secara keseluruhan. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan daerah/nasional dan taraf kemakmuran. Adanya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal baru, sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Sadono Sukirno, 1996:2131).

Dengan demikian, akan menambah output dan pendapatan baru pada faktor produksi akan menambah output daerah/nasional sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Melihat kondisi Kabupaten Raja Ampat yang terbelang daerah pemekaran baru, maka peningkatan modal sangat berperan penting untuk meningkatkan

perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah dan swasta berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan menggenjot investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri.

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal yang digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa dengan harapan dapat memberikan keuntungan pada masa yang akan datang. Menurut Sukirno (1996:132) investasi merupakan pengeluaran atau pengeluaran penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Ada tiga tipe pengeluaran investasi. *Pertama*, investasi dalam barang tetap (*business fixed investment*) yang melingkupi peralatan dan struktur dimana dunia usaha membelinya untuk dipergunakan dalam produksi. *Kedua*, investasi perumahan (*residential investment*) melingkupi perumahan baru dimana orang membelinya untuk ditempati atau pemilik modal membeli untuk disewakan. *Ketiga*, investasi inventori (*inventory investment*) meliputi bahan baku dan bahan penolong, barang setengah jadi dan barang jadi (Sadono Sukirno, 1996:134-136).

Perspektif Ekonomi Politik: *Society Centred Approach* dan *State Centres Approach*

Model analisa yang paling populer digunakan dalam memahami persoalan ekonomi dan politik adalah dengan pendekatan *society centred* atau biasa disebut dengan *rent seeking society model*. Model ini mendudukan individu sebagai bisnis sekaligus obyek utama analisis. Argument dasar dari *rent seeking society model* menyebutkan bahwa individu adalah makhluk rasional, dan oleh karenanya maka mereka akan berusaha untuk memaksimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk akumulasi *wealth*. Konsekuensinya, adalah suatu hal yang sulit dihindari bila kemudian setiap individu, akan memanfaatkan interaksi ekonomi untuk pencapaian kepentingan individu. Pada gilirannya, juga sulit dihindari, bila kemudian individu cenderung akan

memanfaatkan pemerintah (*government*) guna meningkatkan dan melindungi individu mereka (M.S. Grindle, 1989:11).

Secara umum, model *rent seeking society* mendefinisikan politik sebagai aktivitas perjuangan kepentingan pribadi-melalui, antara pemberian suara pada pemilihan umum (Pemilu) dan lobby-lobby oleh kelompok kepentingan (*interest group*) untuk mempengaruhi para penguasa agar membuat dan menghasilkan kebijakan, *policy* yang menguntungkan mereka. Lobbi informal, dalam hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mempermudah akses terhadap perolehan keuntungan yang tidak mungkin didapat melalui mekanisme pasar, *competitive market*. Di antara konsekuensi logis dari aktivitas lobbi informal ini adalah akan semakin meningkatkan intervensi pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

Dengan pemahaman dan argumen dasar seperti ini, kiranya sangat dapat dimengerti, bila perspektif ekonomi politik neo klasik, lebih khusus lagi, para pendukung model *rent seeking society* cenderung mengatakan bahwa “karakteristik” utama dari kehidupan politik tidak lain adalah kompetisi antar kelompok kepentingan, *interest group*, untuk mendapatkan akses terhadap perolehan keuntungan dan sumber daya yaitu dikontrol dan dialokasikan oleh Pemerintah (Syarif Hidayat dalam Masyhuri dan Syarif Hidayat, 2001:11-36).

Dalam perkembangan wacana teoritis, terlihat adanya kesamaan pendapat di kalangan para akademis untuk mengatakan bahwa model *rents seeking society* tersebut lebih banyak dapat menjelaskan fenomena politik dan kebijakan publik di Amerika Serikat. Ini utamanya karena, fenomena lobbi oleh kelompok kepentingan, dan perilaku rasional dalam Pemilu, lebih banyak merupakan refleksi dari kehidupan politik di Amerika Serikat. Keadaan ini terjadi, antara lain, karena “fragmentasi” dan pluralisme kelompok kepentingan yang sangat tinggi; adanya kerumitan dalam menciptakan persamaan kepentingan secara “agregat” diakui dan dihargainya peran kelompok kepentingan, dalam mekanisme sistem politik, adanya kepekaan yang tinggi dari kalangan pembuat kebijakan terhadap tuntutan yang datang dari para pendukung mereka; dan adanya tradisi di kalangan pemerintah untuk membuat

kebijaksanaan publik berdasarkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat (Syarif Hidayat dalam Masyhuri dan Syarif Hidayat, 2001: 31).

Lebih jauh, Grindle (1989:23-24) mengatakan bahwa dalam politik Amerika Serikat, terdapat banyak bukti yang menunjukkan kebijakan publik telah dibungkus dan disalurkan kepada kelompok-kelompok kepentingan. Akibatnya, kebijakan publik menjadi sangat terbuka bagi kompetisi kepentingan diantara kelompok-kelompok sosial yang ada, dan proses pengambilan keputusan pun telah menjadi ajang koalisi dan tawar-menawar antara kelompok kepentingan, para anggota legislatif, dan para pejabat eksekutif. Dalam format kehidupan politik seperti inilah maka tidak diragukan bila keberadaan *interest groups* di Amerika Serikat menjadi sangat penting, atau bahkan telah diartikulasikan sebagai sumber dari kekuasaan dan inisiatif bagi perumusan kebijakan publik.

Analisa model lainnya yang dapat dipakai untuk menganalisa tentang hubungan penguasa dan pengusaha adalah *State Centres Approach*. Seperti telah dikemukakan oleh Bate dan Ames (dalam M.S. Grindle, 1989:23-24), bahwa ketika disiplin ilmu ekonomi politik diaplikasikan lebih pada pendekatan *steta-centred*, maka fokus perhatian akan ditujukan pada mengkaji mekanisme penyelenggaraan Negara, dan objek analisisnya adalah para politisi, birokrat, atau bahkan Negara itu sendiri. Dengan fokus perhatian dan objek analisa seperti ini, tidak terlalu sulit untuk dipahami bila kemudian *state centred approach* telah memilih tiga varian model analisis yang dikenal dengan *power-seeking politicians*, *rent-seeking bureaucrats*, dan *predatory state*.

Model analisa *power-seeking politicians* memiliki asumsi dasar yang menyebutkan para politisi adalah makhluk rasional yang tidak steril dari perhitungan untung-rugi dalam setiap pengambilan keputusan. Kepentingan utama dari para politisi adalah memaksimalkan, dan bila mungkin, mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Untuk tujuan itu, maka para politisi akan dimotivasi oleh keinginan menggunakan sumber daya apa saja yang dimiliki guna memberikan ganjaran kepada siapa saja yang mendukung mereka, dan memberikan “hukuman” kepada siapa saja yang mencoba untuk menggangu.

Model analisa *rent-seeking bureaucrat* memfokuskan perhatiannya dalam rangka mempelajari dan menjelaskan perilaku para birokrat dalam kapasitas mereka sebagai perangkat pelaksana administrasi Negara. Diantara argument yang sering dijadikan sebagai acuan adalah asumsi dasar dari *bureaucratic behaviour theory* yang menyebutkan para birokrat adalah makhluk hidup biasa yang memiliki emosi dan tata nilai, dan oleh karenanya mereka pun memiliki sejumlah tujuan individu yang tidak selamanya sesuai dengan tujuan dari birokrasi itu sendiri.

Asumsi dasar *bureaucratic behaviour theory* di atas, kemudian telah menjadi elemen utama dari pondasi teritis dalam midel bentuk-bentuk kepentingan individu dari pada aparat pelaksana birokrasi pemerintahan. Secara umum, bentuk kepentingan pribadi dari para birokrat adalah untuk akumulasi keuntungan ekonomi jangka pendek. Namun dalam banyak kasus, para birokrat juga sangat berkepentingan untuk meningkatkan atau paling tidak mempertahankan jabatan dan kedudukan yang dimiliki. Untuk mewujudkan pencapaian sejumlah kepentingan individu tersebut, maka para birokrat cenderung akan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki sebagai alat negosiasi (M.S. Grindle, 1989:23-24).

Sementara itu, model analisa *predatory state* merupakan varian ketiga dari *state centred approach*. Perbedaan utama dari modal *predatory state* bila dibandingkan dengan dua model lainnya adalah terletak pada fokus kajiannya, yang telah menjadikan negara sebagai unit analisis. Negara, dalam model analisa *predatory state*, telah diartikulasi sebagai “aktor” yang memiliki kepentingan untuk akumulasi keuntungan ekonomi jangka pendek (umumnya dalam bentuk *ishort term revenues*), dan meningkatkan supremasi kekuasaannya atas *society*. Untuk merujudkan pencapaian kepentingan tersebut, maka negara akan selalu berusaha mengenalkan sejumlah kebijaksanaan walaupun akan menjadi beban, atau kendala bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sementara, untuk memperkuat dominasi kekuasaannya atas *society*, maka negara cenderung mengimplementasikan konsep pembangunan ekonomi irrasional, dan mempertahankan mekanisme birokrasi yang tidak efisien (Syarif Hidayat dalam Masyhuri dan Syarif

Hidayat, 2001: 33-34).

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Kota Waisai

Sejak dimekarkan pada 2002, Kota Waisai yang menjadi Ibukota Kabupaten Raja Ampat mengalami banyak kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan ekonomi perkotaan, yang ditandai dengan makin meningkatnya kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Waisai. Namun, bersamaan dengan kemajuan tersebut masih pula dihadapi berbagai permasalahan, terutama masalah kemiskinan di perkotaan, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan alam, penurunan kualitas lingkungan kota, serta kesenjangan tingkat pelayanan antarkota, antara kota dan desa, serta antardesa. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Arthemias Mambrisauw, Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat, sesuai dengan hasil wawancara dengan penulis.

“Kota Waisai telah banyak melakukan perubahan, khususnya dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat. Namun meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi Kota Waisai. Tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Kota Waisai adalah menyelesaikan masalah kemiskinan, mempersiapkan masyarakat kota agar mampu berperan serta aktif dalam pembangunan, memelihara lingkungan perkotaan yang sehat, mengatur pengelolaan lahan dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, serta menyeraskan pembangunan perkotaan dan pembangunan perdesaan. Dalam upaya pembangunan ekonomi Kota Waisai juga dihadapkan pada berbagai kendala, terutama di antaranya adalah keterbatasan sumber daya alam, seperti sumber air dan lahan perkotaan yang makin terbatas, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan sumber dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mencukupi dan terjangkau masyarakat serta keterbatasan struktur lembaga pemerintahan untuk mengelola perkotaan (wawancara

dengan Arthemias Mambrisauw, Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat, pada Senin, 2 Maret 2015).”

Kebijakan pembangunan ekonomi perkotaan yang diprogramkan pemerintah Kabupaten Raja Ampat terhadap Kecamatan Kota Waisai pada dasarnya meliputi mengembangkan dan memantapkan sistem perkotaan; meningkatkan kemampuan dan produktivitas kota; meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; memantapkan kelembagaan dan kemampuan keuangan perkotaan; melembagakan pengelolaan pembangunan yang terencana dan terpadu; memantapkan perangkat peraturan pendukung pembangunan perkotaan; serta meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial ekonomi perkotaan (*Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 – 2015*”, Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010).

Selain itu, dalam rangka merangsang perkembangan investasi di sektor ekonomi andalan dan mengembangkan kegiatan perekonomian di Kota Waisai, dilaksanakan program pengembangan ekonomi perkotaan, yang meliputi (a) pemantapan ketersediaan fasilitas pasar, sentra produksi dan fasilitas perdagangan lainnya termasuk kemudahan prosedur dan perizinan bagi kegiatan usaha masyarakat di perkotaan; (b) pemantapan lembaga perekonomian sekaligus peningkatan kemudahan pencapaian fasilitas keuangan guna menunjang kegiatan usaha masyarakat; (c) pembinaan pengusaha skala menengah, kecil, dan tradisional termasuk koperasi disertai dengan pemantapan pola hubungan perdagangan yang saling menunjang; dan (d) perluasan kesempatan kerja terutama bagi tenaga kerja setempat.

Dalam implementasinya, program pembangunan ekonomi di Kecamatan Kota Waisai ternyata menemui banyak hambatan dan kendala. Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat yang awalnya bertujuan menjadikan Kota Waisai sebagai daerah ibukota kabupaten yang sejahtera dan mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Raja Ampat ternyata masih jauh dari harapan. Dari hasil

penelitian ini terdapat beberapa hambatan dalam implementasi program pembangunan ekonomi di Kecamatan Kota Waisai.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Agenda peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di tingkat daerah semakin memiliki nilai strategis, sehingga masyarakat diharapkan lebih memiliki kreativitas dan inovasi dalam melihat peluang pasar atau ekonomi di daerah. Oleh karena itu, dalam terminologi pembangunan ekonomi sumber daya manusia atau penduduk menjadi asset tenaga kerja yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan. Kekayaan alam yang melimpah tidak akan mampu memberikan manfaat yang besar bagi manusia apabila sumber daya manusia yang ada tidak mampu mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia. Hal ini juga seperti disampaikan oleh M. Guzali Tafalas, Pengamat Ekonomi Politik dari Universitas Negeri Papua.

“Dari banyak hambatan proses pembangunan ekonomi di ibukota Kabupaten Raja Ampat adalah masalah sumber daya manusia, meskipun faktor-faktor lainnya juga berpengaruh. Kondisi kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat masih tergolong sangat rendah. Ini yang mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi berjalan lambat. Padahal dalam proses pembangunan ekonomi dibutuhkan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam melihat semua cela. Lebih dari itu, dalam proses percepatan pembangunan ekonomi daerah, masyarakat dituntut untuk menjadi produsen, tidak sekedar sebagai distributor, apalagi hanya konsumen. Masyarakat mesti menjadi masyarakat yang produktif dalam melahirkan segala macam produksi baik barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat akan cepat tumbuh. Di sinilah letak kelemahan dan hambatan proses pembangunan ekonomi di Kecamatan Kota Waisai. Untuk itu pemerintah daerah perlu menjadi aktor utama dalam memperbaiki kualitas pendidikan, maupun juga intensitas pelatihan terhadap masyarakat (wawancara

dengan M. Guzali Tafalas, Pengamat Ekonomi Politik dari Universitas Negeri Papua, pada hari Kamis, 5 Maret 2015).”

Dari hasil penelitian ini produktivitas masyarakat di Kecamatan Kota Waisai masih rendah, sehingga mengakibatkan rendahnya produksi pula. Karena sebagian besar penduduknya hanya sebagai pekerja, serta hidupnya sebagian berasal dari sektor pertanian tradisional. Akibatnya tingkat investasi juga akan rendah yang berakibat pada lesunya pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan ekonomi yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan ekonomi di Ibukota Kabupaten Raja Ampat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 3%, hanya berasal dari pemanfaatan sumber daya alam intensif (pertanian), bidang jasa, dan arus modal pinjaman. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi.

2. Keterbatasan Modal Usaha

Jika melihat kondisi UMKM di Kecamatan Kota Waisai masih terbilang sangat rendah, meskipun demikian telah banyak menyerap tenaga kerja. Terdapat beberapa jenis UMKM yang ada di Kecamatan Kota Waisai yang masih berupa industri rumahan (*home industry*), bengkel, fotokopi, dan kontrakan/rumah kos. Di tahun 2012 jumlah UMKM masih sangat rendah, untuk jumlah *home industry* hanya 2 unit, untuk usaha bengkel 15, untuk usaha jahit 7, fotokopi 5 unit, dan kontrakan/rumah kos sebanyak 29 unit. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan baik berupa barang dan jasa, kebanyakan didatangkan dari luar daerah.

Untuk sektor perdagangan di Kecamatan Kota Waisai masih sangat sederhana dan berskala kecil. Aktivitas perdagangan banyak dilakukan di pasar yang menjadi tumpuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Di mana pasar merupakan pusat perdagangan untuk melakukan transaksi barang ataupun jasa antara penjual dan pembeli. Namun tidak selalu aktivitas perdagangan terjadi di pasar. Perdagangan dalam

skala kecil dapat terjadi di toko, kios, maupun warung. Jumlah yang ada di Kecamatan Kota Waisai sebanyak 3 pasar yang ada di Kelurahan Sapordanco, Kelurahan Bonkawir, dan Kelurahan Warmasen, sedangkan took/warung klontong terdapat di semua kelurahan.

Permasalahan utama yang dihadapi para penggerak usaha mikro kecil menengah dan koperasi dalam pengembangan usahanya adalah masalah keterbatasan modal usaha, meskipun masih banyak lagi kendala. Sebenarnya terkait dengan masalah modal, saat ini pilihan sumber modal sudah banyak dan beragam, misalnya lembaga keuangan bank atau KUR. Namun, sebagian besar pelaku UKM mengalami kendala dalam mengakses sumber-sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut. Jika soal pembiayaan masih jadi kendala, maka akan sulit berbicara lebih jauh mengenai kualitas produk, harga, keragaman hingga inovasi. Hal yang sama juga disampaikan oleh M. Guzali Tafalas, Pengamat Ekonomi Politik dari Universitas Negeri Papua.

“Masalah utama dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Kota Waisai, dan di daerah-daerah lain pada umumnya, adalah terkait masalah keterbatasan modal usaha. Hal ini umumnya disebabkan karena keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal seperti bank, di samping keterbatasan pengetahuan atau kemampuan dalam mencukupi kebutuhan posedor/persyaratan perbankan. Akibatnya praktek pelepas uang (*rentenir*) sekalipun memiliki bunga tinggi akan tetapi tetap mendapat tempat bagi para penggerak usaha kecil menengah karena aspek layanan yang mudah, cepat dan tepat waktu sesuai kebutuhan. Untuk itu sebagai upaya menyikapi masalah ini perlu ada langkah-langkah nyata dan cepat dari pemerintah daerah, seperti halnya pendampingan dan pembinaan pada UMKM oleh pemerintah daerah hingga membuat kebijakan atau formula oleh pemerintah pusat untuk mempermudah UMKM mendapatkan akses ke sumber modal (wawancara dengan M. Guzali Tafalas, Pengamat Ekonomi Politik dari Universitas Negeri Papua, pada hari

Kamis, 5 Maret 2015).”

Pemerintah pusat sebenarnya telah banyak mengeluarkan program atau skim yang telah disediakan untuk memberdayakan UMKM. Program ini hendaknya terus dioptimalisasikan. Program-program tersebut antara lain, Kredit Usaha Rakyat (KUR); Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), KKPE adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui kelompok tani atau koperasi; Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP), PUAP merupakan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan); Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS); dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).

Demikian juga program-program yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini berangkat dari kepedulian dari BUMN untuk memberdayakan UMKM melalui bagian laba sebesar 2,5 persen yang digunakan untuk pemberdayaan UMKM. Disisi lain Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian lainnya langsung melakukan pembinaan terhadap UMKM di seluruh wilayah tanah air. Termasuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan langsung melakukan pembinaan dan pemberian fasilitas pajak kepada UMKM.

Diharapkan juga pemberdayaan UMKM akan dilakukan oleh pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mereka miliki, antara lain melalui bapak angkat, plasma, pembinaan manajemen dan berbagai kegiatan untuk pemasaran produk UMKM. CSR diharapkan juga digulirkan oleh industri perbankan Indonesia guna memberikan kemudahan dan akses kredit kepada para pelaku UMKM. Namun lagi-lagi program-program pemerintah tersebut belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat di Kecamatan Kota Waisai pada khususnya, dan masyarakat Kabupaten Raja Ampat pada umumnya, sehingga program pemberdayaan UMKM yang dicanangkan

pemerintah hanya sebatas pada program belum sampai terimplementasikan dengan baik.

3. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Masyarakat di Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat masih terasa ketal menganut sistem masyarakat tradisional. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah ajaran akan stratifikasi sosial penduduk. Pada umumnya menurut tradisi di tengah masyarakat di Kecamatan Waisai terdapat tiga golongan masyarakat. Golongan pertama adalah golongan bangsawan, kedua adalah golongan rakyat bebas, dan ketiga adalah golongan budak. Golongan bangsawan adalah golongan yang menduduki lapisan atas dalam stratifikasi sosial di masyarakat. Dalam bahasa Maya, golongan ini disebut *umfun*, berasal dari kata *um* dan *fun*, yaitu *um* berarti rumah tangga, dan *fun* berarti wangsa/ningrat. Jadi *umfun* berarti rumah tangga atau keluarga bangsawan meliputi semua anggota keturunan raja (Johsz R. Mensoben, 1995:125-128.).

Golongan rakyat bebas atau rakyat merdeka dalam bahasa Maya disebut *bala*, artinya rakyat. Mereka ini digolongkan ke dalam tiga sub golongan. Sub golongan pertama adalah orang-orang yang berasal dari semua klan kecil yang nenek moyangnya bersama-sama dengan raja pertama mendirikan suatu kerajaan tertentu. Dalam struktur organisasi pemerintahan tradisional golongan merdeka menempati jabatan-jabatan pelaksana kekuasaan. Sementara itu, golongan ketiga adalah penduduk yang bertempat tinggal di luar pusat kekuasaan raja. Mereka ini sesungguhnya adalah penduduk asli dari wilayah-wilayah taklukan yang dikuasai oleh seorang raja.

Meskipun demikian, masyarakat di Kota Waisai memiliki rasa kekerabatan yang kuat antara satu sama lain. Banyak suku dan kelompok adat yang masih merasa dirinya berasal dari satu garis keturunan. Ciri-ciri kehidupan masyarakat ada kabupaten Raja Ampat adalah hidup berkelompok dalam sebuah suku dan tiap-tiap suku berpencar satu sama lain. Hidupnya bergantung kepada hasil alam dan sering berpindah (kecuali yang sudah mengenal budaya modern), Tali persaudaraan antara suku yang kuat, menganut garis keturunan ayah dan ibu, memiliki kepercayaan magis dan tata cara adat.

Di samping itu, karakteristik masyarakat di Kecamatan Kota Waisai juga sama seperti wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Raja Ampat, yakni tradisi kehidupan masyarakat masih menganut budaya patriarki. Di mana dalam budaya patriarki, kekuasaan bapak (kaum lelaki) yang mendominasi, mensubordinasikan, dan mendiskriminasikan kaum perempuan. Segala bidang terpusat pada laki-laki, perempuan memiliki peran untuk mengurus pangan, ternak, anak, dan pekerjaan rumah tangga (urusan domestik). Sedangkan segala urusan publik berada di kaum lelaki. Perempuan kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Perempuan menghasilkan hampir 80% kegiatan produktif (pertanian dan peternakan), namun kontrol terhadap hasil tersebut ada di tangan laki-laki. Kondisi ini sama, baik sebelum ada kontak dengan dunia luar maupun saat ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa kini dominasi/tekanan laki-laki terhadap perempuan lebih kuat sebagai kompensasi dari keadaan lelaki yang sedang kehilangan identitas diri (Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Raja Ampat, 2012:5).

Dengan sistem sosial dan budaya yang semacam ini tentu akan menghambat partisipasi dan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena tujuan pembangunan ekonomi sendiri adalah tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan taraf hidup ini bisa diukur melalui kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk. Sementara itu, kenaikan pendapatan per kapita terjadi apabila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari penambahan penduduk, sehingga dalam hal ini penambahan investasi menjadi salah satu jalan keluar. Penambahan investasi ini dibutuhkan untuk memperluas hasil-hasil produksi sehingga pendapatan dapat meningkat.

4. Kinerja Birokrasi Pemerintahan Kurang Efektif dan Efisien

Birokrasi memang menjadi faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi, khususnya dalam era otonomi daerah seperti

sekarang ini. Birokrasi menempati peran sentral dalam mengimplementasikan setiap langkah dan kebijakan pemerintah khususnya dalam mendukung program-program ekonomi. Jika dikaitkan dengan praktek birokrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, kondisi birokrasi masih menunjukkan belum adanya profesionalisme yang menekankan pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Meskipun pemerintahan daerah Kabupaten Raja Ampat telah melahirkan kebijakan reformasi birokrasi dalam bentuk pelayanan satu atap, namun implementasinya masih banyak kekurangan. Hal sama juga disampaikan oleh M. Guzali Tafalas, Pengamat Ekonomi Politik dari Universitas Negeri Papua.

“Salah satu hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat dalam proses pembangunan ekonomi di ibukota kabupaten adalah belum tercapainya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Memang pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan dan program yang mengarah pada proses reformasi birokrasi, namun hasil belum terlihat. Untuk hal-hal perizinan saja masih membutuhkan waktu sehari-hari, terlebih lagi untuk perizinan usaha di Kabupaten Raja Ampat yang saya ketahui membutuhkan waktu hingga lebih dari satu bulan. Dengan model birokrasi yang seperti, tentu akan mempengaruhi para investor baik dari dalam maupun luar daerah, khususnya investor asing. Terlebih lagi masih banyaknya peraturan daerah yang menurut hamat saya masih menghambat investasi di Kabupaten Raja Ampat, khususnya di Kecamatan Kota Waisai, seperti peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah (wawancara dengan M. Guzali Tafalas, Pengamat Ekonomi Politik dari Universitas Negeri Papua, pada hari Kamis, 5 Maret 2015).”

Dengan prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit tidak saja menyebabkan ekonomi biaya tinggi. tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Dalam kasus pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, perkembangan investasi seringkali tidak

digerakkan semata-mata oleh pertimbangan potensi daerah, dukungan infrastruktur, dan prospek ekonomi, akan tetapi juga ditentukan oleh peraturan dan regulasi serta pelayanan birokrasi pemerintah. Regulasi yang bersifat distortif dan pelayanan birokrasi pemerintah yang buruk sangat potensial menghambat investasi. Jika dicermati, jumlah produk hukum (dalam bentuk peraturan daerah) yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat saat ini relatif cukup banyak. Di satu pihak, gejala ini dianggap sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, namun di lain pihak, juga dianggap sebagai eksese atas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Sebab sebagian besar produk hukum yang dihasilkan tersebut nampak lebih berorientasi pada upaya menarik sebanyak mungkin pungutan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Timbul kesan, desentralisasi dan otonomi daerah dianggap sebagai bentuk legitimasi untuk meningkatkan PAD, sehingga ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) sulit untuk dihindari.

Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan memiliki logika berpikir atas kalkulasi sederhana, biaya izin usaha termasuk pajak di Indonesia lumayan besar dan itu pun belum menjamin izin tersebut tuntas dari hulu sampai hilir, belum lagi perizinan turunan di tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Ditambah biaya-biaya informal untuk mempercepat proses perizinan, jatah-jatah pihak-pihak yang berkepentingan, proposal pembangunan tempat ibadah, pembangunan sekolah dan lainnya. Apa jadinya jika ditambah lagi beban perusahaan dengan Perda-Perda yang terkait dengan investasi dan penanaman modal.

Kerjasama Pemerintah, Pelaku Usaha (Swasta), dan Masyarakat dalam Proses Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Kota Waisai

Kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta merupakan satu langkah yang bisa dilakukan dalam rangka menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Keterbatasan pemerintah daerah tidak hanya dalam pengertian keterbatasan dana, tetapi juga keterbatasan jumlah tenaga, kemampuan/keahlian dan pengalaman. Maka untuk menutupi keterbatasan itu dan sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan perundangan yang berlaku maka pemerintah daerah bisa melibatkan peran sektor swasta.

Peran swasta di sektor publik bukan merupakan hal baru dalam pembangunan infrastruktur, tetapi isu ini menjadi menarik karena menjadi tren di berbagai negara dalam satu dekade terakhir. Secara nasional, konsep ini menjadi populer ketika pemerintah menyelenggarakan *Indonesia Infrastructure Summit I* pada awal tahun 2005. Beberapa proyek pemerintah seperti jalan tol, pengelolaan air minum, listrik dan telekomunikasi ditawarkan kepada swasta sebagai proyek kerjasama. Bahkan di tingkat lokal, beberapa daerah melibatkan pihak swasta dalam berbagai proyek infrastruktur mereka.

Upaya melibatkan pihak swasta dalam berbagai proyek pemerintah bukan tanpa alasan kuat. Ide ini terutama dilandasi oleh pemikiran bahwa pemenuhan infrastruktur publik memerlukan dana yang besar. Sementara, kebutuhan infrastruktur terus meningkat baik karena penambahan penduduk maupun untuk penggantian infrastruktur lama yang telah usang. Jika pembangunan hanya mengandalkan dana yang bersumber dari pemerintah, maka usaha menyediakan infrastruktur yang layak akan sulit diwujudkan. Pada akhirnya, negara/daerah menjadi semakin tidak kompetitif karena tidak mampu menyediakan infrastruktur secara memadai.

Masuknya pihak swasta melalui pola kemitraan dengan pemerintah memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah tersedianya alternatif berbagai sumber pembiayaan; pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat; berkurangnya beban (APBN/APBD) dan risiko pemerintah; infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak; kinerja layanan masyarakat semakin baik; dan akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan.

Secara normatif, dalam peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dijelaskan mengenai tahap pelaksanaan proyek kerjasama yang terdiri dari :

1. Perencanaan Proyek, meliputi kegiatan

- identifikasi dan pemilihan Proyek dan Penetapan Prioritas Proyek Kerjasama.
2. Penyiapan Proyek, meliputi kajian awal prastudi kelayakan (Outline Business Case) dan kajian kesiapan proyek kerjasama (Project Readness).
 3. Transaksi Proyek, meliputi penyelesaian pra studi kelayakan, dan pelelangan umum badan usaha; dan
 4. Manajemen Pelaksanaan Proyek yang meliputi perencanaan manajemen pelaksanaan perjanjian kerjasama dan implementasi manajemen pelaksanaan perjanjian kerjasama

Secara garis besar tahapan dalam proses kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dengan pihak swasta telah dilalui sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang ada. Namun yang menjadi masalah, di setiap tahun anggaran, hanya terdapat empat perusahaan yang setiap tahunnya mendapat proyek pemerintah daerah. Hal tentu dikarenakan tidak adanya persaingan dalam proses pelelangan tender proyek. Dalam kondisi yang semacam ini, tentu rawan terjadinya praktek perburuan rente (*rent seeking*) yang dilakukan oleh birokrat dan pengusaha dengan menggunakan dana APBD. Mengingat terkesan adanya monopoli perusahaan dalam setiap proyek pemerintah daerah. Hal ini seperti hasil wawancara penulis dengan M. Guzali Tafalas, Pengamat Ekonomi Politik dari Universitas Negeri Papua, yang menjelaskan bahwa :

“Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta yang selama ini yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat terkesan monopoli, mengingat jumlah perusahaan di Kecamatan Kota Waisai sangat terbatas. Tentu dengan kondisi yang semacam ini menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya praktek-praktek perburuan rente akibat dari pemberian proyek yang bersumber dari APBD. Di samping itu, kondisi semacam ini tentu tidak akan menyehatkan bagi proses pembangunan ekonomi, khususnya di Ibukota Kabupaten, Kota Waisai, mengingat keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan daerah masih sangat terbatas. Untuk itu perlu adanya dorongan pemerintah untuk menarik sebanyak mungkin perusahaan

baik dari dalam maupun dari luar daerah (wawancara dengan M. Guzali Tafalas, Pengamat Ekonomi Politik dari Universitas Negeri Papua, pada hari Kamis, 5 Maret 2015).”

Kondisi-kondisi tersebut tentu merupakan kondisi ideal, yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat di daerah mampu secara aktif bersinergi dalam proses pembangunan ekonomi. Namun faktanya, kondisi ini tidak berjalan di Kabupaten Raja Ampat. Jika dilihat secara umum, peran masing-masing pihak belum sepenuhnya berjalan. Praktek kemitraan yang diterapkan di Kabupaten Raja Ampat, terlihat keragaman bidang yang dimitrakan dengan swasta dan juga model-model yang diterapkan. Namun demikian, ada kecenderungan tertentu yang bisa terlihat dari pola kemitraan yang ada, yaitu bahwa kemitraan yang dilakukan masih terbatas pada jenis layanan barang dan jasa, sedangkan jenis layanan administratif belum pernah diterapkan. Atau dengan kata lain belum ada inovasi dari daerah yang menerapkan kemitraan dalam bidang pelayanan administratif, yang diterapkan masih terbatas pada 2 (dua) jenis pekerjaan yaitu pembangunan fisik dan pengelolaan.

Lemahnya Investasi di Kecamatan Kota Waisai

Secara garis besar besaran investasi yang ada di Kecamatan Kota Waisai, sebagai ibukota Kabupaten Raja Ampat masih belum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Memang secara umum, antusiasme pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat belum sepenuhnya dibarengi dengan agenda-agenda yang jelas dan komprehensif yang secara internal dikreasikan sendiri oleh pemerintah daerah. Perumusan kebijakan investasi, penyempurnaan peraturan dan regulasi, penyusunan master-plan investasi, pengembangan sistem informasi investasi, pelayanan *one-roof system* atau *one-stop shop*, pengembangan *partnership*, belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Nampak jelas bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mengalami reorientasi peran, dari peran tradisional menuju peran kewiraswastaan.

Padaحال iklim investasi yang kondusif pasti dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, baik berskala besar maupun kegiatan ekonomi

kerakyatan. Sehingga mendorong kemampuan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang bergairah akan mampu menciptakan pasar tenaga kerja, iklim usaha yang kompetitif, meningkatkan perputaran uang, dan mendatangkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Kondisi yang ada di Kabupaten Raja Ampat ialah pemerintah daerah belum mampu memberikan jaminan keamanan berusaha bagi investor baik lokal maupun dari luar, termasuk asing, untuk mengembangkan usaha di daerah Kabupaten Raja Ampat, khususnya di Kecamatan Kota Waisai. Alasan mendegnya investasi di Kabupaten Raja Ampat menurut M. Guzali Tafalas (wawancara dengan M. Guzali Tafalas, Pengamat Ekonomi Politik dari Universitas Negeri Papua, pada Kamis, 5 Maret 2015) dikarenakan para investor yang mengembangkan usaha di daerah Kabupaten Raja Ampat, termasuk di Kecamatan Kota Waisai masih dihadapkan pada masalah-masalah kepastian hukum dan jaminan keamanan, kondisi infrastruktur pendukung, serta birokrasi yang simple, cepat, dan transparan. Tujuan penyelenggaraan investasi hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi birokrasi di daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Iklim investasi kondusif terjadi jika pemerintah daerah, swasta dan masyarakat umum sama-sama dapat mengambil keuntungan atas keberadaan sebuah investasi. Pendapatan pajak pemda meningkat, pelaku usaha memperoleh laba tinggi, dan tenaga kerja terserap sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Kondisi ideal ini dapat terjadi jika ada pola kemitraan antar ketiga pihak di atas. Bukan kemitraan (kolusi) pemda dengan DPRD untuk melahirkan Perda yang dapat memperpanjang rantai birokrasi sehingga ada celah untuk melakukan pemungutan-pemungutan.

Sejak otonomi daerah digulirkan, ternyata tidak banyak memperbaiki kondisi sektor riil di Kecamatan Kota Waisai, terutama UMKM yang masih sulit berkembang akibat buruknya

infrastruktur yang menghambat pertumbuhan investasi, serta jaminan keamanan berusaha. Di sisi lain, Kebijakan dan regulasi pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat, juga belum bisa mendukung sektor riil dengan mayoritas APBD digunakan untuk belanja rutin. Hampir tidak ada anggaran untuk insentif bagi pengembangan sektor usaha produktif tersebut.

Solusi dari kondisi tersebut, dapat diawali dengan menelaah kembali fungsi pemerintah daerah dalam memasarkan potensi yang dimiliki, untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus mampu memberikan jaminan keamanan berusaha sebagai daya tarik investasi, baik kepastian hukum, infrastruktur, maupun birokrasi yang efektif dan efisien. Pelayanan birokrasi yang kurang baik dapat diatasi dengan upaya pengembangan perilaku bersih di lingkungan pejabat teras. Budaya birokrasi umumnya bersifat paternalistik sehingga keteladanan pimpinan (patron) akan menentukan strata birokrasi di bawahnya (klien) untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, setiap kebijakan daerah yang dipandang distortif atau mengganggu kelancaran dunia usaha dan investasi harus segera direformasi. Penjaringan suara dan aspirasi para pengusaha harus dilakukan untuk menggali input yang lebih lebih obyektif.

Sistem perpajakan dan retribusi daerah juga hendaknya didesain untuk menarik investasi baru dan menjaga kenyamanan pengusaha. Dengan dalih untuk peningkatan PAD, seringkali pemda tidak sabar untuk segera menjerat para investor yang baru saja menanamkan modal di daerah dengan berbagai pungutan. Pemda ini menginginkan dapat menarik keuntungan sejak awal kedatangan investor. Padahal untuk menjalankan perusahaan hingga menghasilkan keuntungan, investor membutuhkan waktu dan usaha keras.

Namun demikian, meskipun Pemda memberikan "kemudahan" bagi para investor dan pengusaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, haruslah tetap dijaga dampak sosial dan lingkungan yang terjadi. Pro kepada investor bukan berarti semua jenis usaha layak diizinkan, apalagi investasi yang merugikan masyarakat sekitar. Pemerintah harus memperketat perizinan para pelaku usaha multinasional yang bergerak di

bidang eceran (ritel) modern, seperti hipermarket. Pemerintah perlu memikirkan persyaratan ketat, agar kehadiran hipermarket tidak merugikan produsen produk lokal dan petani di dalam negeri untuk jangka panjang.

Bagaimanapun, para produsen lokal dan petani daerah harus lebih diprioritaskan eksistensinya. Pemerintah harus mengawasi realisasi riil investasi asing apakah sesuai dengan Izin Usaha Industri dan Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID). Kehadiran investor justru seharusnya dapat membantu petani dan produsen lokal dalam memasarkan produk atau komoditas yang dihasilkan serta menciptakan lapangan kerja. Menarik atau tidaknya investasi di daerah, baik bagi perusahaan asing maupun penanam modal dalam negeri di setiap daerah otonom pasti berbeda-beda. Kualitas kebijakan dan Peraturan Daerah yang dirumuskan pemda sangat mempengaruhi iklim investasi ini selain tentunya potensi sumber daya yang ada.

Program Pengembangan Masyarakat di Kecamatan Kota Waisai Melalui Dana *Corporate Social Responsibility*

Kondisi masyarakat di Kecamatan Kota Waisai masih tergolong sebagai wilayah tertinggal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Raja Ampat tahun 2014, angka kemiskinan dan pengangguran sebesar 24,15 % dari total jumlah penduduk Kecamatan Kota Waisai. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil survey di tahun 2009. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2013 mencapai 207 orang atau sebesar 7,41 % dari total penduduk produktif. Sementara itu, angka kemiskinan di Kecamatan Kota Waisai dari tahun ke tahun memang mengalami penurunan. Pada tahun 2010 angka kemiskinan mencapai 32,05%, kemudian menurun jadi 29,73% di tahun 2011. Hingga Maret 2012, tingkat kemiskinan di Kecamatan Kota Waisai adalah 24,15%, apabila angka tersebut dikonversikan ke jumlah penduduk, maka ditemukan angka 276 jiwa penduduk masih masuk dalam kategori miskin. Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat terus berupaya mengentaskan kemiskinan di Kecamatan

Kota Waisai sebagai ibukota kabupaten, dengan beragam program.

Namun meskipun demikian, angka kemiskinan di Kota Waisai masih terbilang besar. Hal ini tentu menjadi permasalahan daerah, maka diharapkan bukan hanya pemerintah daerah yang memikirkan pemecahan masalah tersebut. Pihak swasta atau privat sektor juga diharapkan mengambil peran untuk membantu pemerintah menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kecamatan Kota Waisai sebagai ibukota Kabupaten Raja Ampat. Dalam proses pembangunan ekonomi, peran sektor swasta juga sangat dibutuhkan, hal ini berdasar pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan perusahaan khususnya perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk mengeluarkan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan peraturan ini, diharapkan sektor swasta terutama sektor atau industri yang menggunakan sumber daya alam dalam menjalankan usahanya agar dapat lebih meningkatkan perannya dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran melalui kebijakan dana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawannya atau yang biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah merupakan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab secara social dan lingkungan terhadap dampak yang timbul akibat beroperasinya perusahaan di suatu daerah. Tanggung jawab sosial perusahaan saat ini telah menjadi istilah yang kerap kita dengar dalam suatu perusahaan, walaupun banyak perdebatan tentang definisinya di antara para ilmuan, praktisi maupun akademisi. Hal ini disebabkan karena CSR adalah konsep atau istilah yang berasal dari luar, permasalahan utamanya memang adalah memberikan pemaknaan atau arti yang sesuai dengan pemahaman orang Indonesia, karena kebanyakan hal atau istilah dari luar biasanya disalah artikan oleh masyarakat Indonesia, sehingga tujuan konsep yang seharusnya malah melenceng dan berbeda dengan tujuan awalnya.

Peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam

usaha menyukseskan program pembangunan ekonomi, sehingga konsep pembangunan partisipatif bisa terealisasi. Pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up*).

Selama ini, sektor swasta hanya dianggap sebagai pihak yang hanya mencari untung atau modal sendiri tanpa memperhatikan nasib masyarakat miskin, sementara masyarakat dianggap sebagai objek pembangunan yang tidak terlibat dalam proses pembangunan dan hanya menerima program yang diberikan tanpa adanya kesempatan untuk ikut dalam pembangunan tersebut. Sehingga pembangunan tidak memuaskan masyarakat dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin malah semakin sulit untuk di satukan. Hal ini bisa dilihat dalam realita kehidupan antara di desa dengan di perkotaan.

Oleh karena itu, agar partisipasi sektor swasta relevan, dorongan eksternal untuk mengatur perilaku sektor swasta menjadi mutlak. Regulasi pemerintah yang mengatur aktivitas sosial perusahaan menjadi penting. Perluasan dari aturan-aturan hukum yang ada untuk memastikan perilaku bertanggung jawab dari sektor swasta, misalnya hukum tenaga kerja dan lingkungan hidup, harus diutamakan. Dengan adanya peran dari konsep CSR atau *Corporate Social Responsibility* yang ada dalam perusahaan swasta, jika dimanfaatkan secara maksimal memang bisa berguna dan sedikit banyak bisa mempengaruhi pola perubahan kemiskinan di negara ini. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab secara social dan lingkungan terhadap dampak yang timbul akibat beroperasinya perusahaan disuatu daerah. Bila sebelumnya perusahaan hanya memperhatikan Keuntungan (*Profit*), ke depan perusahaan juga harus memperhatikan masyarakat (*People*) dan Lingkungan (*Planet*).

Kombinasi ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah 3P ataupun Triangle P. Salah satu implementasi konsep CSR adalah dengan menjalankan program *community development* (pengembangan masyarakat). Program *community*

development merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi social ekonomi dan kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.

Kegiatan kegiatan dari program *community development* seperti program kemitraan, pendampingan dan pemberian pinjaman lunak kepada kelompok usaha kecil menengah, pendampingan kelompok tani, pelatihan wirausaha, pelatihan ketrampilan kerja, pemberian beasiswa, dan lain-lain tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mencapai kondisi ekonomi dan sosial yang lebih baik sehingga dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran di negeri ini. Kegiatan-kegiatan *community development* tersebut dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui bahwa bentuk dan model kegiatan dari program *community development* mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Hal ini bergantung pada pola kehidupan masyarakat, kearifan lokal dan budaya dari masyarakat tersebut. Saat ini, model penyusunan program *community development* yang baik telah beralih dari *top-down* (program yang dibuat langsung oleh perusahaan), menjadi model *bottom-up* (program diusulkan oleh masyarakat dan dimediasi oleh CSR officer perusahaan). Model ini sangat bermanfaat karena program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat merasa memiliki program tersebut. Hal ini penting agar dana yang dikeluarkan perusahaan yang jumlahnya tidak kecil bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saat ini sudah cukup banyak perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya. Namun, kebanyakan hanya bersifat charity (bantuan atau amal) dan dampaknya hanya bersifat sementara karena dana yang digunakan tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kedepan, diperlukan suatu standar penerapan CSR yang baik sehingga dana besar yang dikeluarkan tidak terkesan sia sia.

Pengentasan kemiskinan pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah

proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai “pemberdayaan masyarakat” apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau obyek saja.

Sebenarnya yang dituntut masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan. Hal ini bisa diterjemahkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (*growth and equity*). Dalam konteks kecamatan ini berarti peningkatan laju investasi, pemberdayaan ekonomi pedesaan, peningkatan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan dan kualitas akses bagi masyarakat. Area seperti kualitas pendidikan dan pemerintahan bersih merupakan wilayah yang langsung memberi manfaat kepada perusahaan. Namun, sektor swasta akan secara voluntary terlibat pembangunan ekonomi pedesaan, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan pemerataan. Jika kenyataan ini diabaikan, jelas ada disharmoni antara klaim penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan sektor swasta dengan tuntutan penanggulangan kemiskinan secara terpadu yang diharapkan masyarakat. Jika hal ini diabaikan, jelas ada ketidak sefahaman antara pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan sektor swasta dengan tuntutan penanggulangan kemiskinan secara terpadu yang diharapkan oleh masyarakat masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Carter dalam Rustiningsih menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan proses belajar masyarakat; mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab; mengeliminasi perasaan terasing sebagian masyarakat serta menimbulkan dukungan dan penerimaan dari pemerintah.

Pendidikan partisipasi masyarakat yang

aktif dan efektif akan dapat diwujudkan apabila dimulai dengan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat yang diinterpretasikan dengan tingkat kehadiran. Selanjutnya tingkat partisipasi akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, status sosial, status ekonomi warga masyarakat sehingga masing-masing individu akan memberikan bentuk partisipasi yang berbeda-beda. Kegiatan partisipasi yang dilakukan adalah berbasis pada kegiatan penyumbangan ide, gagasan, pendapat, prakarsa, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah yang semua itu akan efektif apabila masyarakat bisa aktif hadir dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Apabila tingkat partisipasi suatu daerah dikategorikan rendah, maka dengan sendirinya tujuan dan manfaat dari kegiatan partisipasi tersebut tidak akan tercapai secara optimal. Beberapa tujuan dan manfaat partisipasi masyarakat seperti peningkatan proses belajar masyarakat maupun mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab adalah bersifat abstrak sehingga tidak mudah untuk diidentifikasi keberhasilan pencapaiannya. Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga di tangan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah daerah.

Simpulan

Kabupaten Raja Ampat melakukan serangkain strategi pembangunan ekonomi dalam rangka membangun ibukota daerah di Kecamatan Kota Waisai. Setidaknya terdapat lima kebijakan utama yang dimaksudkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di Kecamatan Kota Waisais sebagai ibukota Kabupaten Raja Ampat. (1) mengembangkan dan memantapkan sistem perkotaan; (2) meningkatkan kemampuan dan

produktivitas kota; (3) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; (4) memantapkan kelembagaan dan kemampuan keuangan perkotaan; dan (5) melembagakan pengelolaan pembangunan yang terencana dan terpadu. Selain itu, dalam rangka merangsang perkembangan investasi di sektor ekonomi andalan dan mengembangkan kegiatan perekonomian di Kota Waisai, dilaksanakan program pengembangan ekonomi perkotaan, yang meliputi (a) pemantapan ketersediaan fasilitas pasar, sentra produksi dan fasilitas perdagangan lainnya termasuk kemudahan prosedur dan perizinan bagi kegiatan usaha masyarakat di perkotaan; (b) pemantapan lembaga perekonomian sekaligus peningkatan kemudahan pencapaian fasilitas keuangan guna menunjang kegiatan usaha masyarakat; (c) pembinaan pengusaha skala menengah, kecil, dan tradisional termasuk koperasi disertai dengan pemantapan pola hubungan perdagangan yang saling menunjang; dan (d) perluasan kesempatan kerja terutama bagi tenaga kerja setempat.

Namun dalam implementasinya, program pembangunan ekonomi di Kecamatan Kota Waisai ternyata menemui banyak hambatan dan kendala. (1) masalah kualitas sumber daya manusia. produktivitas masyarakat di Kecamatan Kota Waisai masih rendah. Karena sebagian besar penduduknya hanya sebagai pekerja, serta hidupnya sebagian berasal dari sektor pertanian tradisional; (2) keterbatasan modal usaha. Permasalahan utama yang dihadapi para penggerak usaha mikro kecil menengah dan koperasi di Kecamatan Kota Waisai dalam pengembangan usahanya adalah masalah keterbatasan modal usaha; (3) sistem sosial dan sikap masyarakat. Dengan sistem sosial dan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Kota Waisai menghambat partisipasi dan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi; dan (4) kinerja birokrasi pemerintahan kurang efektif dan efisien.

Model pembangunan ekonomi yang ada di Kecamatan Waisai Kabupaten Raja Ampat tidak dapat ditumpukan hanya pada pemerintah daerah, mengingat makin kompleks dan rumitnya permasalahan yang terjadi. Perubahan paradigma pembangunan juga menjadi tuntutan otonomi daerah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat

di tingkat lokal. Dari sini tanggung jawab terhadap pembangunan daerah dibebankan pada tiga pilar utama, yakni pemerintah daerah, pelaku usaha (swasta), dan masyarakat. Pola kemitraan ketiga pilar utama pembangunan daerah tersebut menjadi kata kunci bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah. Dalam kemitraan semacam ini, pemerintah daerah hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, peraturan, dan fasilitator. Sedangkan peran swasta harus tumbuh dalam berbagai sektor pembangunan, sebagaimana terjadi di negara yang telah maju, peran swasta lebih besar daripada peran pemerintah.

Kemudian untuk mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan, pemerintah menetapkan tiga kebijakan utama, yakni membangun dasar hukum yang kuat untuk mengurangi ketidakpastian berusaha, menghapus regulasi yang menghambat kompetisi bebas, dan mengembangkan kebijakan penentuan harga oleh pasar. Namun masalahnya pola kemitraan tersebut tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai pembuat regulasi dan kebijakan yang sehat dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif. Begitu juga pihak pelaku usaha (swasta) masih terbatas pada orientasi profit belum sepenuhnya mendorong adanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat setempat pun belum berperan sebagai mestinya, sebagai masyarakat yang mampu melahirkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Hasilnya proses pembangunan ekonomi di Kecamatan Kota Waisai berjalan lamban, dan harapan mewujudkan daerah ibukota kabupaten yang mandiri dan memiliki efek positif bagi wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Raja Ampat belum dapat diwujudkan.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Raja Ampat. 2012. *Perempuan Raja Ampat*. Raja Ampat: Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Raja Ampat.

- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Grindle, M.S. 1989. *The New Political Economy: Positive Economics and Negative Politics*, Working Paper, Country Economic Department, The World Bank.
- Masyhuri dan Syarif Hidayat (ed.). 2001. *Menyingkap Akar Persoalan Ketimpangan di Daerah; Sebuah Kajian Ekonomi Politik*. Jakarta: Pramator.
- Mensoben, Johsz R. 1995. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjad Mada University Pres.
- Sukirno, Sadono. 1996. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarmidi, Lepi T. 1992. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Pusat Antar Universitas, 1992.



SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
Universitas Nasional